

Kaum Nasionalis Dalam Dunia Pergerakan

Bondan Kanumoyoso

Universitas Indonesia

Pengantar

Dunia pergerakan Nasional Indonesia bermula di awal abad ke-20 yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Segera setelah berdirinya organisasi modern tempat berhimpun para pemuda tersebut, berkembang berbagai bentuk gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk memajukan masyarakat dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ada berbagai ideologi yang muncul di masa pergerakan nasional. Tiga ideologi atau kekuatan utama yang menghidupkan dunia pergerakan adalah seperti yang dikatakan Sukarno di dalam artikelnya di tahun 1926, yaitu: nasionalisme atau kebangsaan, Islam, dan marxisme atau komunisme. Budi Utomo sebagai salah satu pelopor bangkitnya dunia pergerakan mengusung ideologi kebangsaan meskipun masih sangat kuat diwarnai oleh budaya Jawa. Sementara itu organisasi Sarekat Islam (SI), bermula dari sarekat dagang Islam yang didirikan oleh Tirtoadisuryo dan H. Samanhudi pada tahun 1911, merupakan perwujudan dari perjuangan masyarakat muslim Indonesia. Kekuatan ketiga dalam dunia pergerakan adalah kaum komunis yang perjuangannya semakin mengemuka sejak berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1914.

Sepanjang masa pergerakan nasional, awal abad 20 sampai tahun 1942, dua kekuatan yang secara terus menerus secara konsisten memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah kaum nasionalis dan kekuatan Islam. Kaum komunis muncul sebagai kekuatan politik yang resmi hanya sampai tahun 1926. Pada tahun tersebut mereka mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang menyebabkan PKI sebagai partai dilarang di Hindia Belanda dan para pemimpin dan anggotanya di tahan dan dibuang ke Digul di Papua. Sementara itu kekuatan Islam mencapai masa kejayaannya bersama dengan semakin besarnya organisasi Sarekat Islam sebelum akhirnya mengalami perpecahan pada tahun 1921 karena disusupi oleh kaum komunis. Setelah itu perjuangan SI diteruskan oleh beberapa organisasi dan partai Islam, namun hingga akhir masa pergerakan tidak ada lagi yang mencapai keberhasilan seperti ketika SI masih utuh.

Berbeda dengan kaum komunis maupun kekuatan Islam, kaum nasionalis relatif dapat terus mewarnai dunia pergerakan dengan kekuatan yang kurang lebih sama hingga akhir masa kolonial. Penahanan Sukarno dan pembubaran PNI pada tahun 1931 tidak menghancurkan kaum nasionalis. Segera setelah itu berdiri Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia. Sejak itu kekuatan kaum nasionalis terbelah dua, yaitu antara mereka yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial dan yang menolak. Meskipun ada dua bentuk perjuangan tetapi cita-cita mereka tetap sama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Dalam bagian selanjutnya dari makalah ini akan dibahas perkembangan perjuangan kaum nasionalis dalam dunia pergerakan nasional yang berwujud organisasi maupun partai politik. Pembahasan tidak meliputi seluruh organisasi dan partai politik yang didirikan oleh kaum nasionalis Indonesia, tetapi sebatas organisasi dan partai yang mewakili perjuangan kaum nasionalis di masa pergerakan.

Budi Utomo: Awal Mula Pergerakan Kaum Nasionalis

Segera setelah Politik Etis diterapkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1901 terjadi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Berbagai perbaikan yang diusung oleh Politik Etis telah membawa peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek yang paling jelas memperlihatkan perubahan adalah dalam bidang politik. Pada tahun 1908 di Batavia berdiri sebuah organisasi modern yang dipelopori oleh para pemuda yang bersekolah di STOVIA. Penggagas dari berdirinya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Pada awal abad ke-20 Dr. Wahidin menggagas penggalangan dana untuk beasiswa para pemuda Jawa yang melanjutkan pendidikannya. Dalam rangka mewujudkan gagasannya itu Ia berkeliling Jawa dan mengadakan berbagai pertemuan untuk mendapatkan dukungan. Sambutan paling bersemangat terhadap gagasan Dr. Wahidin diberikan oleh para pelajar STOVIA, dan bahkan gagasannya dikembangkan lebih lanjut dengan mendirikan organisasi Budi Utomo pada hari minggu 8 Mei 1908.

Diantara para siswa STOVIA yang mejadi pelopor berdirinya Budi Utomo adalah Soetomo dan Soeradji. Pendirian Budi Utomo mendapat dukungan darai para pelajar STOVIA, antara lain: Goenawan Mangoenkoesoemo, Soewarno, Gombreg, Mohammad Saleh, dan Soelaiman. Dilihat dari nama-nama pendukung organisasi modern ini terlihat bahwa mereka semua adalah pemuda Jawa. Fakta tersebut menjelaskan bahwa Budi Utomo merupakan organisasi modern yang terutama menghimpun para pemuda Jawa dan mengusung cita-cita untuk memajukan

masyarakat Jawa. Dengan demikian corak gagasan nasionalisme yang disung oleh Budi Utomo adalah etnonasionalisme. Kenyataan ini merupakan hal yang wajar, karena di awal abad ke-20 gagasan nasionalisme yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia masih dalam proses pembentukan. Dalam tahap awal ini gagasan tentang suatu bangsa yang disebut dengan Indonesia masih sebatas sebagai pemahaman dalam bidang ilmu untuk menyebutkan entitas wilayah yang meliputi seluruh kepulauan Nusantara.

Dalam memajukan masyarakat, Budi Utomo mengutamakan jalur pendidikan. Kongres pertama organisasi ini yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908 tidak hanya dihadiri oleh para pemuda, tetapi juga oleh kalangan priyayi dan bangsawan Jawa. Kongres itu dibuka oleh pidato Dr. Wahidin yang mengemukakan masalah pendidikan yang memerlukan biaya besar sehingga tidak dapat dijangkau oleh para orang tua. Karena itu perlu diadakan program beasiswa untuk menolong para pemuda dari keluarga yang sederhana. Dalam kongres tersebut salah pembicara dari kalangan siswa STOVIA adalah Gunawan. Ia menyampaikan hal yang berbeda dengan Dr. Wahidin. Menurut Gunawan pendirian sekolah tambahan di desa-desa adalah masalah yang lebih mendesak dari pada penggalangan beasiswa. Sedangkan Soetomo mengajukan pendapat tentang pentingnya pendidikan dasar di dalam setiap program menyeluruh bagi pendidikan di berbagai bidang.

Pendapat yang radikal dalam kongres itu dikemukakan oleh Tjipto Mangunkusumo. Dalam pidatonya Ia menyarankan Budi Utomo untuk tidak sekedar menjadi organisasi pendidikan dan kebudayaan, tetapi menjadi organisasi politik. Dengan berwujud sebagai partai politik perjuangan untuk memajukan masyarakat akan dapat dijalankan dengan lebih efektif. Nasib dan taraf hidup masyarakat bumiputera tidak cukup hanya diperbaiki melalui jalur pendidikan. Menurut Tjipto Mangunkusumo kekuatan politik akan dapat mengadakan suatu perubahan nyata terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendapat ini memiliki nuansa yang kental berupa semangat perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Pendapat Tjipto saat itu sangat berbeda dengan mayoritas anggota Budi Utomo. Kebanyakan anggota Budi Utomo ingin mengadakan perbaikan masyarakat secara bertahap tanpa melakukan penentangan secara langsung terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Setelah kongres kedua Budi Utomo yang juga diadakan di Yogyakarta (10-11 Oktober 1909) keanggotaan Budi Utomo semakin didominasi oleh para priyayi. Melemahnya peran para

pemuda di dalam Budi Utomo menyebabkan organisasi ini kehilangan karakter dinamisnya dan berubah menjadi organisasi mapan selayaknya organisasi para priyayi Jawa lainnya. Dengan semakin konservatifnya Budi Utomo, daya tarik organisasi ini bagi para pemuda dan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang ingin mengadakan perubahan menjadi semakin berkurang. Di tangan para priyayi Budi Utomo menjadi organisasi yang lebih banyak memperjuangkan kemajuan budaya Jawa. Karena tujuannya yang tidak terlalu luas, organisasi ini semakin lama anggotanya menjadi semakin terbatas. Kesulitan dana dan ketidakpopuleran Budi Utomo menyebabkan menjadi organisasi kecil sebelum akhirnya pada tahun 1935 melebur ke dalam Parindra.

Indische Partij: Wadah Perjuangan Orang Hindia

Setelah Budi Utomo berdiri, dunia pergerakan nasional mengalami dinamisasi sehingga bermunculan berbagai organisasi masyarakat maupun politik yang menjadi wadah bagi perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka. Salah satu wadah perjuangan pertama yang berwujud partai politik dan berlandaskan pada ideologi nasionalisme adalah Indische Partij yang berdiri pada tahun 1912. Nama partai ini masih menggunakan Bahasa Belanda dan hal itu menjelaskan bahwa hingga saat itu Bahasa Belanda masih menjadi Bahasa utama di kalangan kaum terdidik di Indonesia. Meskipun menggunakan nama Belanda, Indische Partij adalah partai yang keanggotaannya terbuka bagi semua orang di Hindia Belanda dan program perjuangannya mengusung nasionalisme Hindia. Kata Indische digunakan karena pada saat itu kata Indonesia belum lazim digunakan dalam dunia pergerakan. Meskipun menggunakan kata Indische, namun nasionalisme yang diusung oleh Indische Partij adalah sama dengan gagasan tentang nasionalisme Indonesia.

Tiga tokoh utama dari Indische Partij adalah Douwes Dekker atau yang kemudian terkenal sebagai danudirjo Setiabudi, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Sebagai seorang indo Douwes Dekker telah lama lama merasakan keganjilan dalam kehidupan masyarakat kolonial. Terjadi berbagai diskriminasi yang membedakan status sosial seorang Belanda totok, Indo, dan bumiputera. Pemerintah kolonial sebagai pihak yang berwenang menata kehidupan masyarakat yang seharusnya menghilangkan perbedaan-perbedaan, justru adalah pihak yang melanggengkan diskriminasi tersebut. Menurut Douwes Dekker jika ingin perbaikan nasib maka kaum Indo harus bekerja sama dengan bumiputera untuk mengadakan perubahan. Hindia

bukan hanya untuk orang Belanda Totok, tetapi untuk mereka semua yang merasa dirinya orang Hindia. Pandangan ini yang menjadi landasan dari ideologi nasionalisme yang diperjuangkan oleh Indische Partij.

Kritikan terhadap kehidupan kolonial telah sejak awal abad 20- dilayangkan oleh Tjipto Mangunkusumo. Segera setelah lulus sebagai dokter dari STOVIA pada tahun 1905 Tjipto melibatkan diri dalam dunia pergerakan nasional. Tulisan-tulisannya yang bernada kritis banyak dimuat di surat kabar *De Locomotief*. Menurutnya masyarakat Jawa sulit mengalami kemajuan karena dikungkung oleh feodalisme. Kehidupan masyarakat Hindia secara keseluruhan juga mengalami eksploitasi yang berlebihan sehingga kemiskinan dan keterbelakangan menjadi realita sehari-hari. Untuk itu kolonialisme harus diakhiri. Caranya adalah melalui perjuangan politik. Pemikiran inilah yang menyebabkan Tjipto Mangunkusumo memilih untuk keluar dari Budi Utomo, setelah organisasi itu tidak mendukung usul yang dikemukakannya tentang pentingnya perjuangan politik. Tjipto menemukan teman sepemikiran dengannya di dalam diri Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat. Karen itulah ia kemudian bersama-sama dengan mereka mendirikan Indische Partij.

Tokoh berikutnya dalam Indische Partij, yaitu Suwardi Suryaningrat, kemudian hari dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, telah lama melakukan kritik terhadap pemerintah kolonial. Berbagai tulisannya yang memuat pandangan-pandangannya tentang kehidupan masyarakat kolonial yang timpang dimuat dalam berbagai koran dan majalah, seperti: *Het Tijdschrift* dan *De Express*. Menurut Suwardi dominasi golongan Belanda totok terhadap orang Indo dan bumiputera harus diakhiri karena tidak memiliki dasar karena hanya didukung oleh kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah kolonial. Agar bisa memperjuangkan persamaan dalam kehidupan sosial secara lebih baik, Suwardi menyarankan agar kaum Indo bersatu dengan bumiputera. Suwardi melalui berbagai tulisannya mengemukakan pentingnya nasionalisme Hindia dalam setiap perjuangan politik. Tujuan dari nasionalisme Hindia adalah menghapuskan dominasi kolonial dan menyadarkan kelompok Indo dan bumiputera bahwa mereka harus bersatu menghadapi musuh yang sama, yaitu berbagai eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

Ideologi dari Indische Partij adalah jelas yaitu nasionalisme dengan tujuan mencapai kemerdekaan tanah air Hindia dari pemerintah kolonial. Bagi partai ini tanah Hindia bukan milik orang Belanda saja, tetapi menjadi rumah bagi semua kelompok yang ada, yaitu orang-orang

bumiputera, indo, Arab, Tionghoa, Belanda dan mereka semua yang mengaku dirinya sebagai orang Hindia. Pandangan Indische Partij tersebut pada awalnya dikenal sebagai Indische Nationalisme yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai organisasi dan partai politik di masa pergerakan. Salah satu partai politi yang melanjutkan pandangan tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mengembangkannya menjadi Nasionalisme Indonesia. Pandangan politik Indische Partij mendatangkan reaksi yang keras dari penguasa tanah koloni. Permohonan partai ini kepada pemerintah kolonial pada tahun 1913 untuk diakui sebagai badan hukum ditolak. Bahkan partai ini dinyatakan sebagai partai terlarang sikap keras pemerintah kolonial menjadi pertanda bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan diberikan sebagai hadiah. Dalam mewujudkan kemerdekaan tidak ada pilihan bagi kaum pergerakan kecuali mengadakan perjuangan politik dan perlawanan.

Peristiwa menentukan dalam perjalanan Indische Partij adalah pembentukan “Komite Bumiputera” dalam menanggapi perayaan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis yang ke-100 pada tahun 1913. Komite ini dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat. Ia pada saat itu juga mengkritik perayaan kemerdekaan belanda tersebut dalam sebuah artikel yang berjudul “*Als Ik een Nederlander was*”. Tujuan dari pembentukan “Komite Bumipuetra” adalah memperjuangkan kebebasan berpendapat dan adanya majelis permusyawaratan yang menyuarakan kepentingan rakyat Hindia. Pemerintah kolonial menganggap kegiatan Komite Hindia sebagai berbahaya. Akibatnya tidak hanya Suwardi Suryaningrat yang ditangkap, tetapi juga Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo. Ketiganya kemudian dijatuhi hukuman buang, dan mereka memilih untuk dibuang ke negeri Belanda.

PNI: Nasionalisme Indonesia Sebagai Dasar Perjuangan

Tokoh utama yang menjadi pendiri dan penggerak PNI adalah Sukarno. Pada tahun 1925, ketika masih menjadi mahasiswa di *Tchenische Hoge School* (THS) di Bandung, Sukarno mendirikan kelompok belajar yang disebut dengan *Algemeene Studie Club* (ALS). Meskipun ALS resminya adalah kelompok belajar dan diskusi namun organisasi ini tidak sebatas membahas masalah-masalah pendidikan akademis yang sedang ditempuh oleh para anggotanya. Dalam kelompok diskusi ini banyak dilakukan diskusi yang berkenaan dengan masalah situasi dunia pergerakan di

Indonesia. Sukarno dan para anggota ALS ketika itu banyak diilhami oleh gagasan nasionalisme dalam memahami situasi politik di Hindia Belanda.

Ketika pemberontakan PKI di 1926 mengalami kegagalan dan para pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, terjadi suatu kekosongan dalam dunia pergerakan terutama dalam corak perjuangan yang bersifat tegas menentang kolonialisme. Situasi ini menyebabkan munculnya suatu pandangan di kalangan kaum pergerakan tentang perlunya suatu wahana perjuangan baru yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat yang menginginkan kemerdekaan. Menghadapi situasi seperti Sukarno dan para anggota ALS seperti: Soejadi, Iskaq Tjokroadisurjo, Budiarto, dan Sunario pada tanggal 4 Juli 1927 berinisiatif untuk mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Pengaruh dari partai nasionalis sebelumnya dapat diketahui dari kehadiran tokoh Indische Partij yaitu Dr. Tjipto Mangunkusumo dalam rapat pendirian PNI. Dalam mempertegas bentuk organisasi sebagai sebuah bentuk perjuangan politik kata “Perserikatan” sebagai nama depan organisasi ini diganti dengan “Partai” pada tahun 1928.

Sebagai sebuah partai, PNI menegaskan garis perjuangannya di dalam Anggaran Dasar Partai yang antara lain menyatakan bahwa tujuan utama PNI ialah bekerja penuh demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Dalam mencapai kemerdekaan asas yang digunakan adalah “dengan berdasar kepada kekuatan sendiri”. Asas itu berarti bahwa berbagai perbaikan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi akan diusahakan dengan berdasarkan kepada kemampuan masyarakat Indonesia dengan tanpa meminta pertolongan siapapun. Dalam mewujudkan cita-citanya Sukarno dan PNI menempuh cara penggalangan massa melalui rapat-rapat umum. Di dalam rapat-rapat tersebut Sukarno dan para pemimpin PNI melakukan propaganda untuk mendapat dukungan rakyat. Selain propaganda secara lisan, dilakukan pula propaganda melalui tulisan. Berbagai tulisan Sukarno dan para pemimpin PNI sejak tahun 1927 selalu menyuarakan pentingnya arti persatuan bagi keberhasilan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka.

Sasaran utama PNI dalam perjuangan politiknya adalah menyebarkan faham nasionalisme ke kalangan rakyat Indonesia. Nasionalisme yang dikampanyekan oleh PNI merupakan ideologi yang menyatakan bahwa kecintaan dan kesetiaan setiap orang yang menyebut dirinya orang Indonesia hendaknya ditujukan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Jika kesadaran nasionalisme dapat menyebar ke seluruh rakyat maka kolonialisme yang selama ini menyengsarakan dan memiskinkan kehidupan rakyat akan dapat diatasi. Cara menghentikan

eksploitasi yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan adalah dengan menyatukan perjuangan semua pendukung paham nasionalisme dalam suatu front bersama untuk menghadapi kekuatan kolonial. Dalam seluruh perjuangan PNI yang dimotori oleh Sukarno, persatuan menempati arti yang sangat penting dalam melaksanakan perjuangan. Sukarno menyebut dirinya sebagai orang yang cinta kepada persatuan. Melalui PNI, Sukarno ingin menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk kemudian mewujudkan cita-cita bersama yaitu bangsa Indonesia yang merdeka dan sejahtera.

Simbol-simbol yang digunakan oleh PNI dalam perjuangannya sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Bendera yang digunakan oleh partai ini berwarna merah putih dengan kepala banteng. Warna merah putih adalah simbolisasi dari kearifan bangsa Indonesia yang telah digunakan sebagai warna bendera berbagai masyarakat di Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sementara banteng merupakan binatang yang sering dianggap melambangkan karakter rakyat Indonesia yaitu: kuat, bersemangat dan tidak mudah menyerah. Sementara itu pemimpin PNI, yaitu Sukarno dengan cepat meraih simpati rakyat dan sejak paruh kedua tahun 1920-an telah dianggap sebagai salah satu pemimpin utama dari dunia pergerakan nasional. Reputasi Sukarno sebagai pemimpin terbentuk dari kepemimpinannya yang kuat dan kemampuannya berorasi yang dengan mudah menarik simpati rakyat dan membangkitkan semangat mereka.

Pada tahun 1929 muncul desas-desus yang menyatakan bahwa PNI akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial seperti yang dilakukan oleh PKI. Desas-desus itu sangat mungkin dihembuskan oleh aparat polisi rahasia pemerintah kolonial, yaitu PID, dengan tujuan untuk provokasi. Karena tidak ada tanda-tanda akan terjadinya pemberontakan, pada akhir pemerintah kolonial memutuskan melakukan penangkapan terhadap para pemimpin PNI. Penangkapan terhadap Sukarno dan beberapa pemimpin PNI lainnya dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 1929. Setelah ditahan selama beberapa bulan, Sukarno bersama tiga pemimpin PNI lainnya, yaitu: Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata diajukan ke hadapan pengadilan kolonial di Bandung. Proses pengadilan terjadi antara tanggal 18 Agustus sampai 29 September 1930. Dalam proses pengadilan inilah Sukarno mengajukan pidato pembelaannya yang terkenal yang berjudul “Indonesia Menggugat”.

Parindra: Melanjutkan Perjuangan Kaum Nasionalis

Ada keterkaitan erat antara Partai Indonesia Raya (Parindra) dan Budi Utomo. Pendiri dari kedua lembaga ini adalah orang yang sama yaitu Dr. Soetomo. Setelah keluar dari Budi Utomo, Dr. Soetomo tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia politik. Setelah dunia pergerakan mengalami berbagai pasang surut, pada tahun 1935 Dr. Soetomo berkeputusan untuk mendirikan Parindra di Surabaya. Partai ini merupakan hasil fusi atau penyatuan dari Budi Utomo, Persatuan bangsa Indonesia (PBI), Partai Sarekat Selebes, sarekat Sumatera, dan lain sebagainya. PBI adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Soetomo pada tahun 1930. Ideologi yang menjadi landasan perjuangan Parindra adalah nasionalisme Indonesia raya dengan tujuan Indonesia mulia dan sempurna. Dalam dunia pergerakan partai ini dikenal mengajurkan dua bentuk perjuangan bagi kaum nasionalis. Pertama, perjuangan kedalam, yaitu perjuangan untuk menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk dapat mendirikan sutua pemerintahan yang berada di tangan mereka sendiri. Kedua, perjuangan keluar, yang bertujuan menggugah pemerintah Belanda agar dapat menerima cita-cita bangsa Indonesia dan kemudian melakukan perubahan-perubahan untuk mengokomodasi cita-cita tersebut.

Berbeda dengan Indische Partij dan PNI yang menempuh jalur perjuangan non-kooperasi (menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial), Parindra menjalankan perjuangannya dengan menempuh jalur kooperasi. Berkat jalur perjuangan kooperasi yang dipilihnya, Parindra dapat dengan lancar menjalankan kegiatannya. Partai ini mendapat izin resmi dari pemerintah kolonial yang ketika itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Stakenborg. Berbagai anak organisasi dibentuk oleh Parindra seperti: gerakan pemuda Surya Wirawan, Rukun Pelayaran dan Rukun Tani. Di awal berdirinya partai ini telah mendapat dukungan yang besar dari rakyat. Tercatat anggota awal organisasi ini terdiri dari 2,425 orang dengan jumlah cabang sebanyak 52 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Parindra mengirimkan wakilnya ke dalam *Volksraad*, dewan perwakilan rakyat bentukan pemerintah kolonial. Wakil Parindra di dalam *Volksraad* adalah Mohammad Husni Thamrin. Sebagai wakil Paridnra Ia banyak menyuarakan masalah keadilan dan pemerataan.

Anggota Parindra terdiri dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh bekas anggota PNI, yaitu Iskaq tjokroadisurjo dan Soenario. Toko-tokoh lain yang bergabung ke dalam partai ini antara lain ialah: Wuryaningrat, Soekardjo Wirjopranoto, Margono djojohadikusumo, dan Susanto Tirtoprodjo. Dalam perjuangannya Parindra tidak hanya bergerak dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan percetakan. Di bidang ekonomi Parindra menganjurkan gerakan

swadesi atau memenuhi kebutuhan sendiri. Ide gerakan swadesi berasal dari tokoh pergerakan nasional India Mahatma Gandhi. Dalam berkembangannya gerakan swadesi dalam sejarah Indonesia lebih dikenal dengan nama swasembada. Ketika Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1946, Parindra melalui anggota Margono Djojohadikusumo, mempelopori berdirinya Bank Negara Indonesia atau yang kemudian dikenal sebagai BNI 46. Di bidang penerbitan, Parindra mendirikan perusahaan penerbitan yang berkantor di Surabaya. Penerbitan tersebut secara berkala mengedarkan majalah *Penyebar Semangat*. Majalah ini menggunakan Bahasa Jawa dan masih terbit hingga tahun 1980an.

Penutup

Dalam sejarah Indonesia kaum nasionalis telah terlibat dalam dunia pergerakan sejak tahap yang paling awal dan terus mewarnai dunia pergerakan hingga ke tahap paling akhir. Perjuangan untuk mewujudkan bangsa Indonesia memang tidak langsung berbentuk dalam kesadaran nasionalisme Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Bentuk awal dari perjuangan kaum nasionalis seperti yang berwujud dalam Budi Utomo masih sangat kental bernuansa kedaerahan. Meski bertitik tolak dari etnonasionalisme, namun dalam perjalanannya tokoh-tokoh Budi Utomo dapat mengenali bahwa permasalahan keterbelakangan dan kemiskinan yang dialami oleh orang Jawa adalah sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh suku-suku dan kelompok-kelompok lain yang ada di Indonesia. Dengan munculnya perasaan senasib dan sepenenderitaan dengan seluruh rakyat Indonesia, mulai muncul benih-benih yang kemudian mengubah etnonasionalisme itu menjadi nasionalisme kebangsaan.

Formulasi dari kesadaran para tokoh pergerakan tentang keberadaan bangsa Indonesia semakin terlihat jelas dalam perjuangan *Indische Partij*. Partai ini tidak lagi bergerak dalam batas-batas etnis, tetapi sudah berusaha menyatukan dua kelompok lintas etnis yang ada di Indonesia, yaitu orang-orang indo dan bumiputera. Kesadaran tentang pentingnya persatuan diantara bangsa Indonesia menjadi semakin jelas di dalam perjuangan PNI. Di bawah kepemimpinan Sukarno, PNI dengan tegas menggariskan dasar perjuangan bangsa Indonesia, yaitu mencapai Indonesia yang merdeka.

Perjuangan mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka dan sejahtera tidak bisa hanya diwujudkan dalam perjuangan politik. Kesadaran ini terlihat jelas dalam garis perjuangan

Parindra. Partai ini tidak lagi sekedar memperjuangkan kemerdekaan dengan melakukan tindakan-tindakan politik, tetapi juga melalui perjuangan di lapangan ekonomi, pertanian, dunia nelayan, kepemudaan, dan bahkan juga penerbitan. Dalam tahap akhir dunia pergerakan nasional Indonesia, Parindra memperlihatkan perkembangan akhir dari bentuk perjuangan kaum nasionalis yang sudah bergerak lebih jauh dengan mengupayakan berbagai persiapan yang dapat mendukung terbentuknya masyarakat sejahtera di dalam Indonesia yang merdeka.

Daftar Pustaka

- Hardjosoediro, Soejitno, *Kronologi Pergerakan kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Hatta, Mohammad, *Permulaan Pergerakan Nasional*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.
- Ingleson, John, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Lev, Daniel S., Ruth McVey, *Menjadikan Indonesia: Dari membangun Bangsa menjadi Membangun Indonesia*, Jakarta: Hasta Mitra, 2008.
- Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: Grafitipers, 1989.
- Niel, Robert van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2009.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2008.